

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yang di definisikan sebagai institusi yang di bentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat yang mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan undang-undang atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumber daya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lainnya adalah (1) BUMDes merupakan milik desa dan pengelolaannya di lakukan secara bersama-sama, (2) modal usaha 51% berasal dari desa dan 49% berasal dari dana masyarakat, (3) operasional dilakukan berdasarkan pada pandangan bisnis yang berbasis budaya lokal, (4) potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang sudah tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha, (5) berdasarkan peraturan yang telah disusun keuntungan yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, (6) fasilitas yang di berikan didukung oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten dan pemerintah desa, (7) pelaksanaan operasional BUMDes diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD beserta anggota.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dimulainya babak baru pembangunan nasional dari satuan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yaitu desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi didesa sebagai lembaga sosial dan komersial. Pada dasarnya pendirian BUMDes dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelahiran BUMDes adalah kemenangan awal bagi desa, dengan adanya BUMDes kini desa memiliki kekuatan untuk menentukan langkahnya sendiri membangun kesejahteraan, sebuah kekuatan yang pupus karena pola kebijakan top down bertahun-tahun sebelumnya, Firren & Suprpto, (2021).

Standar dasar yang melandasi pengelolaan keuangan (BUMDes) menerapkan SAK ETAP. Alasan penerapan SAK ETAP dianggap lebih cocok dibandingkan dengan standar yang lain dikarenakan SAK ETAP bersifat fleksibel, lebih ringan dan lebih mudah untuk diterapkan. Kemajuan tidak hanya diprioritaskan di wilayah perkotaan saja, namun juga mencakup pedesaan secara merata. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan perekonomian pedesaan adalah melalui pertumbuhan usaha kecil desa. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menaikkan ekonomi di wilayah desa yaitu dengan membuat program program yang akan membantu pertumbuhan desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat mempengaruhi setiap unit usaha didesa dalam pembuatan laporan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

Cahyani & Sinarwati, (2021) Menyatakan bahwa pendirian BUMDes merupakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat gunanya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat desa. Usaha desa berperan penting dalam pembangunan desa melalui tata pengelolaan potensi desa yang optimal serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa tanpa harus menutup usaha yang sudah mapan yang didirikan di desa lain. Sedangkan, menurut pendapat Luh Sukriani, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, (2018) menyatakan bahwa BUMDes merupakan organisasi pada desa yang dijalankan oleh masyarakat setempat beserta pemerintah desa, yang berfungsi untuk menguatkan perekonomian desa serta meningkatkan keeratan antar masyarakat, yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan potensial desa.

Menurut Kushartono, (2016) Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah desa untuk mengelola inovasi dan kreatifitas suatu desa, sehingga terbentuknya lapangan kerja baru dan menarik tenaga kerja dari desa. BUMDes wajib memberikan laporan perkembangan usaha, termasuk laporan keuangan. Menurut Kasmir, (2018) singkatnya laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan yang menggambarkan bagaimana status keuangan suatu perusahaan saat ini atau periode yang akan mendatang.

Agar BUMDes dapat berkembang di daerah Mandailing Natal dan untuk menjadi lembaga ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, maka diperlu tingkat perkembangan BUMDes sesuai dengan keadaan perkembangannya. Hal ini menjadi sangat penting bagi sebagai dasar perumusan kebijakan dan promosi BUMDes berbasis kemajuan. Terdapat dalam www.bumdes.id, pada tahun, 2022,

ada 1367 BUMDes di Indonesia yang telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan perusahaan. dan terdapat 632 BUMDes tumbuh, 483 BUMDes yang berkembang, dan 213 BUMDes yang maju. Menurut data dari kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Madailing Natal, BUMDes di Kabupaten Mandailing Natal tercatat sebanyak 155 BUMDes. terdapat 143 BUMDes tumbuh dan 12 BUMDes berkembang.

Objek yang di ambil dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, dikarena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi desa yang dijalankan masyarakat serta pemerintah desa, di Kabupaten Mandailing Natal masih terdapat BUMDes yang bergerak di berbagai bidang usaha yang berbeda. Perkembangan BUMDes di kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan cukup pesat, karena hampir semua desa di Mandailing Natal sudah memiliki BUMDes. Namun tidak semua tumbuh dan berkembang, yang di maksud tumbuh dan berkembang adalah bertambah secara kualitas dan bertambah secara kuantitas BUMDes.

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang memegang peranan dan tanggung jawab penting terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Sebagian besar dalam pengambilan Sumber Daya Manusia BUMDes dilakukan dengan sukarela sehingga masih ada pengelola BUMDes tidak memiliki kompetensi yang memadai di unit keuangan serta kurangnya dalam menggunakan teknologi informasi akuntansi. Kesulitan BUMDes dalam perekrutan Sumber Daya Manusia disisi lain yaitu dalam pemanfaatan teknologi informasi akuntansi yakni munculnya permasalahan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang belum dimanfaatkan

dengan benar.

Pentingnya kompetensi sumber daya manusia di desa terutama kinerja pegawai di BUMDes nyatanya sangat berpengaruh bagi perkembangan BUMDes. Menurut Prasetyo, (2017) bahwa semakin berkompotensi pegawai dalam kaitannya dengan tugas yang mereka lakukan maka semakin memotivasi pegawai untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Hanya pegawai dengan keterampilan yang baik yang dapat melakukan tugasnya dengan baik serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan BUMDes. Fakta di lapangan, menunjukkan ternyata kompetensi sumberdaya manusia di BUMDes Kabupaten Mandailing natal masih rendah karena masih banyaknya pegawai yang belum memahami dan belum memiliki keahlian dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga perlu adanya pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai BUMDes.

Selain dari kompetensi, adapun fakta kedua yang berkaitan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes yaitu penggunaan Teknologi informasi akuntansi di kabupaten mandailing natal masih sangat minim hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk mengaplikasikan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Mandailing Natal masih terdapat pegawai BUMDes yang menyusun laporan keuangan secara manual.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian yang dilakukan (Syam, 2020) yang menguji variabel kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi.

Adapun hasil penelitiannya yaitu kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes. Secara parsial, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes, dan penggunaan teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.

Penelitian ini adalah replika dari Oky et al., (2021) yang meneliti variabel profesionalisme, kompetensi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah mengganti variabel independen dengan penggunaan teknologi informasi akuntansi, alasan mengganti variabel ini adalah karena variabel profesionalisme dan pengalaman kerja sudah termasuk dalam lingkup indikator kompetensi. Alasan peneliti menambahkan variabel penggunaan teknologi informasi akuntansi adalah berdasarkan dari saran peneliti terdahulu agar memperluas peneliti dengan menambahkan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan badan usaha milik desa.

Perbedaan lainnya dari penelitian ini adalah objek penelitian yang digunakan, objek penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Mandailing Natal sedangkan penelitian sebelumnya pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan sawan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kualitas laporan keuangan BUMDes yang dilihat dari Kompetensi, Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi di Kabupaten Mandailing Natal sehingga peneliti tertarik

mengambil judul “Pengaruh Kompetensi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Empiris Kabupaten Mandailing Natal)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi yang ada pada penelitian ini, yaitu :

1. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia antar pegawai BUMDes kerana masih adanya pegawai yang belum memahami dan belum memiliki keahlian dalam pembuatan laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Mandailing Natal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk mengaplikasikan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Kabupaten Mandailing Natal mempengaruhi kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, agar masalah yang diteliti tidak menjadi membesar, peneliti hanya akan fokus kepada kompetensi, teknologi informasi akuntansi terhadap kualiatas laporan keuangan BUMDes.

1.4 Rumusan Masalah

Degan demikian berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan Badan Usaha Dilik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Apakah penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Apakah kompetensi dan penggunaan teknologi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mandailing Natal.

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut Tujuan Peneliti Dari Latar Belakang diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Penggunaan teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi dan Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mandailing Natal

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dilakukan adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes.

2. Bagi pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat mejadi informasi tambahan untuk dipertimbangan saat menentukan kebijakan di Kabupaten Mandailing Natal terkhusus dalam Kualiatas Laporan Keuangan BUMDes.

3. Bagi Akademisi

Peneliti ini harus dapat memberikan informasi perkembangan mengenai kualitas laporan keuangan di bidang akuntansi, terkhusus di bidang Akuntansi Sektor Publik, bagi akademisi dapat dijadikan referensi bagi peneliti.